



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institut of Indonesia Chartered Accountants



KAPd

PROSIDING

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI

SNA XX

UNIVERSITAS JEMBER 2017

*Harmonisasi Spirit Kebhinekaan (Pendalungan)
untuk Penguatan Profesionalitas Akuntan
Menuju Indonesia Jaya*



Monumen Unej

27-30
SEPTEMBER
2017

Pantai Watu Ulo



9 772597 730004



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XX JEMBER
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto, Jember 68121
E-mail : sekretariat-sna20jember@sna-iaikapd.or.id

PROSIDING

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI (SNA) XX JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2017 JEMBER

***“Harmonisasi Spirit Kebhinnekaan
(Pendalungan) untuk Penguatan Profesionalitas
Akuntan Menuju Indonesia Jaya”***

Editor Team:
Ikatan Akuntan Indonesia
Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)

ISSN 9 772597 730004

Diterbitkan:
Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)
2017

No.	Kode.	Judul Paper	Penulis
193	ASPAK-028	KARAKTERISTIK KEPALA DAERAH DAN UKURAN DPRD TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SULAWESI)	YULIA INDAH CINTAMI, BANDI
194	AKMK-072	STRATEGIC PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM, FIRM CAPABILITIES AND BUSINESS STRATEGY	YULIANSYAH YULIANSYAH, ARIEF FADILLAH
195	AKMK-051	NON-FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS, PROCEDURAL JUSTICE, TRUST TO MANAGER AND THEIR IMPACT ON EMPLOYEE LOYALTY	YULIANSYAH YULIANSYAH, MARYANI MARYANI
196	PAK-031	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ENTERPRISE RESOURCE PLANNING	YUNI NUSTINI, DIPTA WAHYU PRABAWA
197	AKSR-033	ANALISIS MARKET SHARE PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	YUNUS HARJITO, DIAN BUDI UTAMI, DIAN INDRIANA HAPSARI
198	AKPM-059	PENGARUH BIOLOGICAL ASSET INTENSITY, UKURAN PERUSAHAAN, KONSENTRASI KEPEMILIKAN, DAN JENIS KAP TERHADAP PENGUNGKAPAN ASET BIOLOGIS (PADA PERUSAHAAN AGRIKULTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PE	YURNIWATI, AMSAL DJUNID, FRIDA AMELIA
199	ASPGG-028	POLITISASI ANGGARAN PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH SAAT PENYELENGGARAAN PILKADA DI PULAU JAWA	ZAENAL SEKTY WIJAYA, BANDI
200	AKPM-074	PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN DERAJAT KONVERGENSI IFRS TERHADAP KUALITAS LABA PADA NEGARA-NEGARA ASEAN	ZHRATUN NADHIR , RATNA WARDHANI

F. DAFTAR PAPER DITERIMA SEBAGAI POSTER PRESENTATION SNA XX JEMBER 2017

DAFTAR PAPER DITERIMA SEBAGAI POSTER -PRESENTATION SNA KE-20 JEMBER 2017			
NO	KODE	JUDUL	NAMA
1	SIPE-083	INVESTIGASI GENDER DALAM PEMBAJAKAN PRODUK DIGITAL: CERITA DARI MAHASISWA DI INDONESIA	ADITYA PANDU WICAKSONO, DEKAR URUMSAH
2	CG-044	DAMPAK SURPLUS FREE CASH FLOW TERHADAP MANAJEMEN LABA: PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI	ALIYA GISTA MAKRFAT, AGUS PURWANTO
3	PPJK-035	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	AMRIE FIRMANSYAH
4	CG-061	CEO-BOD POWER INTERACTIONS AND FRAUD: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE INDONESIAN CONTEXT	ANDRI ZAINAL
5	ASPGG-043	TOWARD COMMUNITY-BASED TOURISM IN TOBA CALDERA: A PARTICIPATORY FRAMEWORK	ANDRI ZAINAL, GAFFAR HAFIZ SAGALA

POLITISASI ANGGARAN PENDIDIKAN SAAT PILKADA PADA PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA

Jenis Sesi Paper: Full paper

Zaenal SektyWijaya
UniversitasSebelasMaret
sekty9@gmail.com

Bandi
Universitas Sebelas Maret
bandi.ssm@gmail.com

Abstract: *This study aims to provide the empirical evidence related to the differences of proportion of the educational budget allocation in a year when the regional election is held and two years earlier, and also the influence of regional head characteristics (the education level of regional head, the age of regional head) and political factors (political party's support, political party competition) on local government's educational budget allocation in Java.*

Data used in this study are secondary data with a sample of incumbent regional heads that held the regional election from 2010 to 2015 in Java. The total samples of local government obtained are 85 local governments. The hypothesis of this study is analyzed using t-test and multiple linear regression test.

The results show that simultaneously all independent variables affect the local government's educational budget allocation. The results show that education level of regional head, the age of regional head, political party's support, and political party competition affect to the local government's educational budget allocation. T-test conducted in this study also showed that there was a politicization of educational budget seen from the difference of the educational budget proportion within the years before the regional election was held and a year when it was held.

Keywords: *budget politicization, educational budget, local government, regional election*

1. Pendahuluan

Berlakunya kebijakan otonomi daerah juga diiringi dengan penerapan desentralisasi pendidikan pada masing-masing daerah otonom. Menurut Fiske (1998: 17), desentralisasi pendidikan adalah suatu kegiatan politis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hajat hidup orang banyak di bidang pendidikan yang melibatkan kebijakan pemerintah dari berbagai tingkat pemerintah. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada masing-masing kepala daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kepala daerah bebas berkreasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan catatan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Kebebasan yang diberikan kepada kepala daerah ini sering disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu, terutama guna membiayai kampanye pencalonan kembali dirinya.

Kepala daerah *incumbent* memiliki kewenangan dalam menggunakan anggaran pendidikan yang dikelolanya sehingga mudah untuk menggunakan anggaran pemerintah guna membiayai keperluan kampanye pencalonan dirinya kembali. Anggaran yang hendak digunakan oleh kepala daerah untuk kepentingan pencalonan dirinya telah diatur sedemikian rupa sejak proses *budgeting*. Politisasi anggaran ini tidak dilakukan oleh kepala daerah seorang diri, namun dapat saja dilakukan secara bersama-sama dengan pihak legislatif. Politisasi anggaran pada umumnya diinisiasi oleh kepala daerah itu sendiri, namun dapat juga sebagai akibat tekanan politik dari lingkungan di sekitarnya. Tekanan politik ini berasal dari legislatif selaku pihak yang memberikan persetujuan dan pengesahan atas usulan anggaran yang diajukan oleh kepala daerah.

Pada dasarnya anggaran pemerintah dianggarkan sebagai pilihan secara rasional, ekonomis dan bebas dari politik, namun pada prakteknya penganggaran sangat terkait dengan politik. Menurut Wildavsky dan Caiden (2004) penganggaran merupakan proses dimana bermacam-macam orang atau kelompok kepentingan mengekspresikan keinginan-keinginan berbeda dan membuat keputusan yang berbeda. Menurut Arifin, Prabowo, dan Trinugroho (2013), struktur politik dan sistem multipartai telah meningkatkan jumlah kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh politik lokal di eksekutif dan legislatif dimana tokoh politik tersebut berperan sebagai raja kecil yang memiliki kekuatan politik untuk memainkan peran dominan dalam semua aspek kehidupan dan menciptakan pemerintahan yang korup. Hal ini dipertegas oleh Ritonga dan Arwan (2010) yang menyatakan bahwa alokasi anggaran dan penentuan besaran anggaran senantiasa mencerminkan adanya kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat terkait dengan konstituennya. Fitriyah (2011) menyatakan bahwa partai politik pendukung turut andil dalam korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, hal ini disebabkan calon kepala daerah harus membayar biaya politik yang cukup besar kepada partai politik pendukungnya. Tanzi (1998) menyatakan bahwa korupsi disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan publik yang tidak hanya untuk manfaat pribadi tetapi untuk membiayai kegiatan partai politik.

Penelitian terkait politisasi anggaran pemerintah dilakukan oleh, Ritonga dan Alam (2010); Indrati (2011); Pratiwi (2012); Harsasto (2014); dan Wicaksono (2015). Ritonga dan Alam (2010) dan Indrati (2010) meneliti politisasi APBD belanja bansos dan belanja hibah pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada dan hasilnya proporsi belanja bansos dan hibah yang dilakukan oleh calon kepala daerah petahana lebih besar daripada calon kepala daerah nonpetahana. Pratiwi (2012) meneliti politisasi

anggaran pada pemerintah kota Batu dan hasilnya terdapat politisasi dalam pengalokasian APBD. Harsasto (2014) meneliti politik siklus anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan pada pemerintah kota Surakarta dan hasilnya tidak terdapat politisasi dalam pengalokasiannya. Wicaksono (2015) meneliti politisasi anggaran belanja modal pada pemerintah provinsi Jawa Timur dengan melakukan uji beda belanja modal pada saat menyelenggarakan pilkada dan saat menjelang pilkada, namun hasilnya tidak terdapat perbedaan dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian terkait politisasi anggaran pendidikan pada APBD pemerintah daerah saat diselenggarakannya pilkada dengan variabel karakteristik kepala daerah dan faktor politik belum dilakukan, oleh karena itu penulis ingin mengembangkan penelitian terkait politisasi anggaran pendidikan pemerintah daerah saat penyelenggaraan pilkada di pulau Jawa.

2. *Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis*

2.1 *Kerangka Teori*

Teori Agency

Teori *agency* merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain (Pratt dan Zeckhauser, 1985 dan Stiglitz, 1987). Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori keagenan yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara.

Politik Anggaran Sektor Publik

Hagen (2002) membagi siklus anggaran menjadi empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation* dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan yang pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif. Politik anggaran paling mendominasi pada kedua tahap awal tersebut, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent. Menurut undang-undang pengelolaan keuangan daerah, siklus penganggaran terdiri dari penyusunan APBD dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Freeman & Shoulders (2003) menyatakan bahwa anggaran yang ditetapkan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif. Anderson, J.E. (1984: 13-15) menyatakan bahwa terdapat lima kategori faktor yang dapat dijadikan kriteria dalam pengambilan keputusan. Pertama, *political values*, pembuat keputusan melakukan evaluasi alternatif kebijakan untuk kepentingan partai politiknya. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan keuntungan publik dimana kebijakan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan guna mencapai tujuan politik atau kelompoknya. Kedua, *organization values*, pihak pembuat keputusan dipengaruhi oleh organisasi, untuk kepentingan organisasi yang dianut oleh pembuat keputusan. Ketiga, *personal values*, pengambilan keputusan bergantung pada nilai atau motif yang dimiliki oleh individu pengambil kebijakan. Keempat, *policy values*, pembuat keputusan dapat bertindak dengan baik berdasarkan persepsi mereka mengenai kepentingan publik atau kepercayaan pada kebijakan publik yang secara moral benar atau pantas. Kelima, *ideological values*, pengambilan keputusan didasarkan pada ideologi yang dianutnya sebagai pedoman dalam berperilaku.

2.2 Pengembangan hipotesis

Proporsi alokasi belanja anggaran pendidikan pada tahun sebelum dan saat pemilihan umum kepala daerah.

Kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang *imanan* dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi (Foucault, 1990). Kepala daerah yang masih menjabat memiliki kekuasaan untuk menggunakan APBD yang dikelolanya. Dalam mengelola APBD tersebut, kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dan terdapat banyak celah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang maupun korupsi. Kepala daerah yang tidak amanah tentu akan melakukan perbuatan yang korup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan kelompoknya. Pemanfaatan APBD untuk kepentingan pribadi atau kelompok tentu tidaklah sulit bagi kepala daerah karena kepala daerah dapat memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya.

Pada tahun saat tidak ada penyelenggaraan pilkada, APBD cenderung tidak ada peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun saat terdapat pilkada. Peningkatan yang signifikan pada saat diselenggarakannya pilkada ini menimbulkan dugaan bahwa kepala daerah telah memanfaatkan anggaran pendidikan pada APBD untuk kepentingan kampanye pilkada. Penelitian yang dilakukan Ritonga dan Alam (2010) menemukan adanya peningkatan alokasi belanja pada APBD saat menjelang pemilu kepala daerah tahun 2010. Hal ini menunjukkan adanya dugaan kepala daerah yang sedang berkuasa melakukan penyimpangan dengan menyisipkan anggaran tertentu yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pilkada baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Terdapat perbedaan proporsi alokasi anggaran pendidikan pada tahun sebelum dan saat pelaksanaan pilkada

Tingkat pendidikan kepala daerah dan proporsi belanja pendidikan pemerintah daerah

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Idris (1992: 102) mendefinisikan pendidikan adalah sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara manusia dewasa dengan anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya, dalam arti supaya dapat mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, agar menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Pendidikan yang ditempuh seseorang juga dapat membentuk karakter atau kepribadian bagi orang tersebut

sehingga pendidikan dijadikan sebagai persyaratan kompetensi dalam memenuhi kualifikasi dasar sebagai kepala daerah.

Eksekutif yang memiliki pendidikan yang tinggi mempunyai keterbukaan pikiran dan kemampuan memproses informasi yang kompleks, karena memiliki kognitif yang lebih baik (Hambrick dan Mason, 1984). Hasil penelitian Amaefula, Okezie, dan Mejeha (2012) menyatakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka keberanian menghadapi risiko akan semakin meningkat. Pendidikan yang tinggi memungkinkan seseorang lebih sering berinteraksi dengan kalangan penguasa pemerintah dan berpeluang mendapatkan proyek pekerjaan (Yusup, 2015). Kepala daerah yang berpendidikan tinggi cenderung dapat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melakukan mitigasi risiko sehingga anggaran belanja pendidikan yang tinggi bukan menjadi suatu kendala baginya. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_2 = Tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap proporsi belanja pendidikan pemerintah daerah di Indonesia.

Umur kepala daerah dan proporsi belanja pendidikan pemerintah daerah

Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan satuan tahun. Umur merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Umur kepala daerah yang tinggi mengindikasikan kedewasaan dan kematangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Semakin tinggi umur pada umumnya pengalaman semakin bertambah dan seseorang akan menjadi lebih hati-hati dan bijaksana. Penelitian Prasetyo (2014) menunjukkan usia seorang kepala daerah menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam berpikir, sehingga lebih bijak dalam mengambil keputusan.

H_3 = Umur kepala daerah berpengaruh negatif terhadap proporsi belanja pendidikan pemerintah daerah

Dukungan partai politik kepala daerah dan proporsi belanja pendidikan pemerintah daerah

Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Laswell dan Kaplan (1970) yang mengatakan kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah

tujuan dari pihak pertama. Calon kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada dapat berasal dari calon yang diusung oleh partai politik atau calon independent yang didukung oleh sejumlah orang. Kepala daerah yang mencalonkan dalam pilkada yang didukung partai politik atau gabungan partai politik berpotensi melakukan penyimpangan. Hal ini disebabkan kepala daerah punya terikat dengan partai politik yang mengusungnya dan punya kewajiban untuk membiayai partai pendukungnya. Kepala daerah yang memiliki latar belakang partai politik yang sama dengan pemerintah pusat akan cenderung melakukan penyimpangan guna mencapai kepentingan mereka yang berdampak pada meningkatnya alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah pusat tidak akan mempersulit kepala daerah dalam hal kepala daerah melakukan tindakan menyimpang karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ = Dukungan partai politik kepala daerah berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan pemerintah daerah.

Kompetisi partai politik di DPRD dan proporsi belanja pendidikan pemerintah daerah

Sistem demokrasi yang dianut di pemerintahan Indonesia telah memunculkan kelompok-kelompok sosial dalam bentuk partai politik. Masing-masing partai politik tersebut saling berkompetisi untuk mendapatkan kursi pemerintahan dan kekuasaan untuk mengendalikan pemerintahan. Downs (1957) mengartikan kompetisi politik sebagai kompetisi antara kandidat untuk mendapatkan suara terbanyak dari pemilihnya. Kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kompetisi politik ini. Kebijakan anggaran dan program kegiatan yang hendak dijalankan kepala daerah tidak dapat diputuskan sendiri oleh pihak eksekutif, pihak eksekutif memerlukan persetujuan dan pengesahan dari pihak legislatif. Berdasarkan uraian di atas, dikembangkan hipotesis:

H₅ = Kompetisi partai politik di DPRD berpengaruh positif terhadap proporsi belanja pendidikan pemerintah daerah.

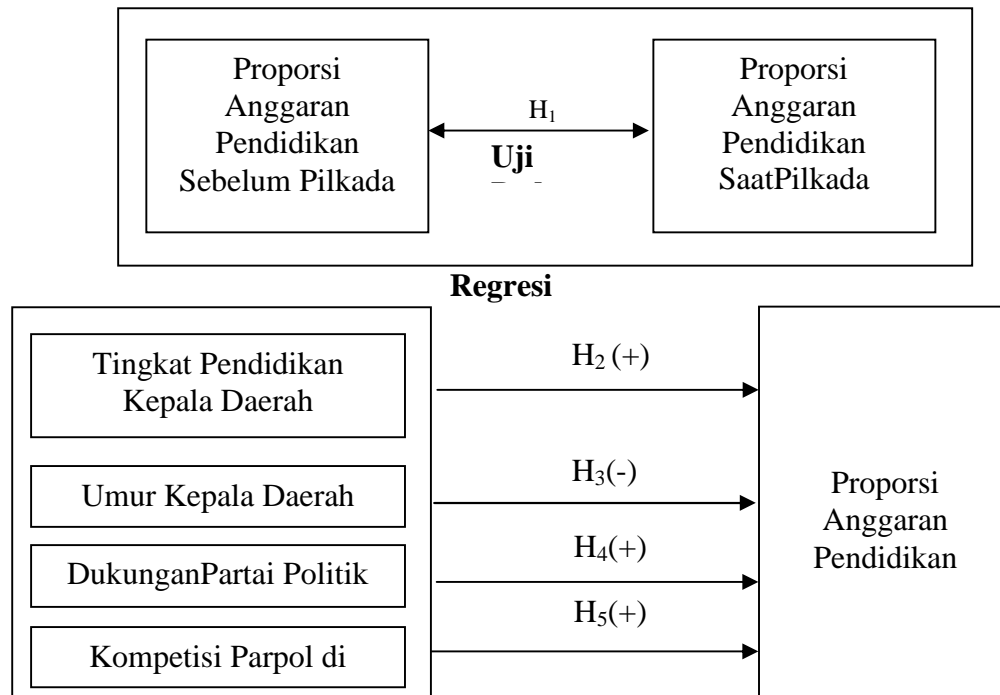
Kerangka konseptual penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi alokasi anggaran pendidikan pemerintah daerah pada waktu sebelum dan pada saat menyelenggarakan pilkada. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan kepala daerah, umur kepala daerah, dukungan partai politik, dan kompetisi partai di DPRD terhadap proporsi alokasi belanja pendidikan pada masing-masing pemerintah daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu

proporsi alokasi belanja pendidikan sedangkan variabel independen terdiri dari: tingkat pendidikan kepala daerah, umur kepala daerah, dukungan partai politik kepala daerah, dan kompetisi partai politik di DPRD.

Berdasarkan tujuan dan hipotesis dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian yang terbagi menjadi dua kerangka sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian



3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksploratif (*explanatory study*) yang bertujuan memperoleh pengertian yang baik mengenai fenomena perhatian dan melengkapi pengetahuan lewat pengembangan teori lebih lanjut serta pengujian hipotesis. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired sample t-test*) untuk pengujian hipotesis pertama. Uji beda digunakan untuk mengetahui beda proporsi alokasi anggaran pendidikan pada tahun sebelum dan saat pilkada, selanjutnya untuk pengujian hipotesis kedua, ketiga, keempat, dan kelima menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel tingkat pendidikan kepala daerah, dan umur kepala daerah, dukungan partai politik dan kompetisi partai politik di DPRD terhadap proporsi alokasi anggaran pendidikan pemerintah daerah.

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Pulau Jawa dengan alasan di Pulau Jawa memiliki peringkat korupsi tertinggi di Indonesia (ICW, 2016). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari peneliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2015, profil kepala daerah dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan website pemerintah daerah, daftar pemilihan kepala daerah (pilkada) beserta partai pendukungnya dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta sumber-sumber lain dari internet.

3.3 Definisi Operasional

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Proporsi Belanja Pendidikan. Proporsi belanja pendidikan dihitung dengan membandingkan anggaran belanja pendidikan terhadap total belanja pemerintah daerah pada tahun yang sama.
- b. Tingkat pendidikan kepala daerah. Tingkat pendidikan adalah jenjang tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kepala daerah. Tingkat pendidikan SMA dan ahli madya diberi nilai (1), tingkat pendidikan strata satu diberi nilai (2), tingkat pendidikan strata dua diberi nilai (3) tingkat pendidikan strata tiga/ lebih tinggi diberi nilai (4).
- c. Umur kepala daerah. Variabel umur dalam penelitian ini diukur dengan jumlah umur kepala daerah sampai dengan tahun pilkada berlangsung dan dikelompokkan menjadi tiga kategori. Umur kurang dari 40 tahun dikategorikan usia muda diberi nilai (1), umur 40 sampai dengan 55 tahun dikategorikan usia menengah diberi nilai (2), dan umur di atas 55 tahun yang dikategorikan usia tua diberi nilai (3).
- d. Dukungan partai politik kepala daerah. Dukungan partai politik merupakan dukungan dari partai politik terhadap calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang menyatakan mengusung pasangan calon pilkada tersebut sebagai kendaraan politiknya dalam memperoleh kekuasaan pemerintahan yang diukur menggunakan empat kelompok kategori, yaitu: kepala daerah yang melalui jalur *independent* (non partai) diberi skor (1), kepala daerah yang tidak didukung partai

koalisi pemerintahan diberi skor (2), kepala daerah yang didukung partai campuran antara koalisi pemerintahan dengan bukan koalisi pemerintahan diberi skor (3), dan kepala daerah yang didukung partai yang menduduki koalisi pemerintah diberi skor (4).

- e. Kompetisi partai politik. Kompetisi partai politik merupakan tingkat persaingan partai politik dalam suatu pemerintah daerah yang dihitung berdasarkan perolehan jumlah kursi partai pengusung calon *incumbent* di legislatif. Rumus kompetisi partai politik yang digunakan dalam penelitian yaitu jumlah perolehan kursi partai politik pengusung kepala daerah dibagi total kursi partai di legislatif.

4. Hasil Pembahasan

4.1 Deskripsi Data

Melalui pendekatan *purposive sampling*, telah diperoleh sampel dengan kriteria tertentu sebanyak 85 pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Sampel Penelitian

No	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
1	Pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.	0	7	18	38	0	54	117
2	Pemerintah daerah yang diikuti oleh calon <i>incumbent</i>	0	(2)	(4)	(7)	0	(6)	(19)
3	Pemerintah daerah yang memiliki proporsi anggaran pendidikan minimal 20%	0	(1)	(1)	(4)	0	(7)	(13)
	Jumlah sampel penelitian	0	4	13	27	0	41	85

Sumber: Data diolah dari KPU, Kemendagri, BPK dan Kemenkeu

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AP	85	25,83	57,11	41,8678	7,43078
TP	85	1,00	4,00	2,6235	,81615
U	85	1,00	3,00	2,2706	,60530
DP	85	1,00	4,00	3,1765	,60112
KP	85	,00	1,00	,4015	,24082
Valid N (listwise)	85				

Sumber:
Hasil

pengolahan SPSS, 2017

Keterangan:

- AP = Proporsi Anggaran Pendidikan,
 TP = Tingkat Pendidikan Kepala Daerah,
 U = Umur Kepala Daerah,
 DP = Dukungan Partai Politik, dan
 KP = Kompetisi Partai Politik di DPRD

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dalam penelitian ini adalah 85 buah. Variabel independen tingkat pendidikan (TP) mempunyai nilai maksimum 4 dan nilai minimum 1. Nilai mean 2,62 dan standar deviasi 0,82. Hal ini berarti rata-rata tingkat pendidikan kepala daerah *incumbent* sudah strata 1. Variabel umur (U) mempunyai nilai maksimum 3 dan nilai minimum 1. Nilai mean dan standar deviasi variabel umur adalah 2,27 dan 0,61. Hal ini berarti sebagian besar kepala daerah *incumbent* berumur antara 45 sampai 55 tahun dan digolongkan usia menengah. Variabel dukungan partai politik (DP) mempunyai nilai maksimum 4 dan minimum 1, nilai mean 3,17 dan standar deviasi 0,60. Hal ini berarti rata-rata kepala daerah *incumbent* didukung oleh partai campuran antara koalisi pemerintahan dengan bukan koalisi pemerintahan. Variabel kompetisi partai politik (KP) memiliki nilai maksimum 1 dan minimum 0, nilai mean 0,40 dan standar deviasi 0,24. Hal ini berarti rata-rata kepala daerah *incumbent* didukung oleh partai yang memiliki jumlah kursi minoritas di legislatif. Variabel dependen proporsi anggaran pendidikan (AP) memiliki nilai maksimum 57,11 dan nilai minimum 25,83, sedangkan nilai mean 41,87 dan standar deviasi 7,43. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan dengan porsi yang besar.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Proporsi Anggaran Pendidikan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AP	85	25,83	57,11	41,8678	7,43078
AP_1	85	23,07	57,78	40,3055	7,71828
AP_2	85	,60	61,15	39,8164	10,55494

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2017

Keterangan:

AP = Proporsi anggaran pendidikan saat pilkada,

AP-1 = Proporsi anggaran pendidikan satu tahun sebelum pilkada, dan

AP-2 = Proporsi anggaran pendidikan dua tahun sebelum pilkada.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dalam penelitian ini adalah 85 buah. Nilai rata-rata proporsi anggaran pendidikan saat pilkada (AP) sebesar 41,87, rata-rata proporsi anggaran pendidikan satu tahun sebelum pilkada sebesar 40,30, dan rata-rata proporsi anggaran pendidikan dua tahun sebelum pilkada sebesar 39,82. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata proporsi anggaran pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun dan proporsi anggaran pendidikan tertinggi terdapat pada tahun saat penyelenggaraan pilkada.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data penelitian telah melalui pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan heterokedstisitas serta dinyatakan lolos untuk melalui tahapan pengujian berikutnya.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Tabel 4
Hasil Uji Paired Sample Test

		Paired Samples Statistics				Kesimpulan
		N	Correlation	t	Sig. (2tailed)	
Pair 1	AP	85	,826	3,219	,002	H₁ diterima
	AP_1	85				
Pair 2	AP	85	,725	2,600	,011	
	AP_2	85				

Sumber:

Hasil

pengolahan SPSS, 2017

Berdasarkan data hasil uji beda pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hipotesis satu diterima, terdapat perbedaan proporsi alokasi anggaran pendidikan pada saat pilkada dengan tahun sebelum penyelenggaraan pilkada. Anggaran pendidikan pada tahun saat diselenggarakannya pilkada (AP) jika dibandingkan pada satu tahun sebelum diselenggarakannya pilkada (AP-1) menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p=0,002$), $p<0,05$) dimana pada tahun AP nilai rata-rata sebesar 41,8678, lebih tinggi dibandingkan

dengan tahun (AP-1) sebesar 40,3055. Anggaran pendidikan pada tahun (AP) jika dibandingkan pada tahun (AP-2) menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p=0,011$), $p<0,05$) dimana pada tahun (AP) nilai rata-rata sebesar 41,8678 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun (AP-2) sebesar 39,8164. Anggaran pendidikan pada tahun (AP-1) jika dibandingkan pada tahun (AP-2) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p=0,469$), $p>0,05$) dimana pada tahun (AP-1) memiliki nilai rata-rata sebesar 40,3055 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun (AP-2) sebesar 39,8164.

Hasil Pengujian Hipotesis atas Model Kedua

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Hi		T	Sig	Hasil
(Constant)		18,156	3,765	,000	
TP	+	2,065	2,271	,026	H ₂ diterima
U	-	2,814	2,267	,026	H ₃ diterima
DP	+	2,803	2,376	,020	H ₄ diterima
KP	+	7,477	2,482	,015	H ₅ diterima
R ²			,283		
Adjusted R ²			,247		
F value			7,895		
Asymp sig			,000		

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 5 di atas, hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7,895 dengan *p-value* dari model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 18,156 + 2,065(TP) + 2,814(U) + 2,803(DP) + 7,477(KP) +$$

Keterangan:

- TP = Tingkat pendidikan kepala daerah,
- U = Umur kepala daerah,
- DP = Dukungan partai politik, dan
- KP = Kompetisi partai politik.

4.4 Diskusi Pembahasan

1) Proporsi anggaran pendidikan pada saat pilkada dan sebelum pilkada

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan proporsi anggaran pendidikan pada tahun saat pilkada dibanding satu tahun dan dua tahun sebelum penyelenggaraan pilkada. Pada saat pemerintah daerah menyelenggarakan pilkada, terjadi kenaikan proporsi anggaran pendidikan. Kenaikan proporsi anggaran pendidikan ini dimungkinkan adanya politisasi anggaran pendidikan guna membiayai biaya pilkada kepala daerah yang sedang mencalonkan dirinya kembali. Kepala daerah *incumbent* memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan politisasi anggaran pendidikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ritonga dan Alam (2010) yang menemukan adanya peningkatan alokasi belanja pada APBD saat menjelang pemilu kepala daerah tahun 2010.

2) Tingkat pendidikan kepala daerah dan proporsi alokasi belanja pendidikan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap proporsi alokasi belanja pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala daerah maka semakin tinggi pula proporsi belanja pendidikan yang dialokasikan. Kepala daerah yang berpendidikan tinggi memiliki kompetensi dalam mengelola anggaran dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Kemampuan yang baik dalam mengelola anggaran membuat kepala daerah semakin berani dalam mengelola anggaran pendidikan yang lebih besar. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Bambe, Jiang dan Wang (2010) dan Seeba *et al.* (2009). Hasil penelitian Bamber *et al.* (2010) menyatakan bahwa tingkat pendidikan manajer yang dihubungkan dengan keterbukaan dalam berfikir, kemampuan dalam memproses informasi mempengaruhi *outcome* organisasi.

3) Umur kepala daerah dan proporsi alokasi belanja pendidikan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa umur kepala daerah berpengaruh positif terhadap proporsi alokasi belanja pendidikan. Arah dari hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesisnya yang menyatakan umur kepala daerah berpengaruh negatif terhadap proporsi alokasi belanja pendidikan. Arah hipotesis tersebut didasarkan pada penelitian Bamber *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa seorang manajer yang berumur tua memiliki kecenderungan untuk melihat dan mengevaluasi informasi dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi umur kepala daerah maka akan semakin berhati-hati dalam menganbil keputusan dan akan menghindari dari risiko yang mungkin terjadi sehingga alokasi anggaran pendidikan akan semakin sedikit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

semakin bertambahnya usia kepala daerah maka semakin tinggi pula proporsi alokasi anggaran pendidikan. Hal ini dapat dimungkinkan bahwa semakin bertambahnya usia kepala daerah maka pengalamannya semakin bertambah dan keberanian dalam mengelola anggaran pendidikan menjadi lebih besar.

4) Dukungan partai politik kepala daerah dan proporsi alokasi belanja pendidikan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dukungan partai politik kepala daerah berpengaruh positif terhadap proporsi alokasi anggaran pendidikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Tanzi (1998) dan Fitriyah (2011) yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan publik untuk membiayai kegiatan partai politik. Kepala daerah *incumbent* yang mencalonkan dalam pilkada yang didukung partai politik atau gabungan partai politik berpotensi melakukan tindakan penyimpangan dengan tujuan untuk membiayai partai pendukungnya. Kondisi ini sesuai dengan teori agensi bahwa kepala daerah yang sedang berkuasa akan melakukan penyimpangan atas kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok partainya. Kepala daerah melakukan penyimpangan untuk kepentingan partai pendukungnya dimungkinkan adanya balas jasa karena partai tersebut telah digunakan sebagai kendaraan politiknya dalam meraih kursi pemerintahan. Sebagai pemegang otorisasi atas belanja bantuan sosial, kepala daerah *incumbent* memiliki kesempatan yang terbuka dalam memanfaatkan dana yang dikelolanya demi kepentingan politiknya.

5) Kompetisi partai politik kepala daerah di DPRD dan proporsi alokasi belanja pendidikan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetisi partai politik kepala daerah di DPRD berpengaruh positif terhadap proporsi alokasi anggaran pendidikan. Semakin tinggi kompetisi partai politik kepala daerah di DPRD, semakin tinggi pula proporsi belanja pendidikan yang dialokasikan. Kepala daerah yang memiliki kompetisi partai politik yang tinggi akan semakin mudah dalam mengalokasikan anggaran belanja pemerintah karena memiliki kekuasaan yang ganda baik di pihak eksekutif maupun legislatif. Pihak yang terlibat dan memegang peranan dalam proses *budgeting* yaitu pihak eksekutif bersama legislatif. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Olson (2000) dan Bardhan dan Yang (2004) yang menyatakan bahwa kompetisi politik akan mempengaruhi cara pemerintah dalam

mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dikuasainya untuk kepentingan politik.

5. *Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan*

5.1 *Kesimpulan*

- 1) Alokasi anggaran pendidikan pada tahun saat penyelenggaraan pilkada mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelum diselenggarakannya pilkada. Kenaikan yang signifikan tersebut menunjukkan adanya politisasi anggaran pendidikan guna membiayai kepentingan pencalonan kembali kepala daerah atau wakil kepala daerah *incumbent*.
- 2) Proporsi alokasi anggaran pendidikan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi secara internal oleh perilaku atau karakter dari kepala daerah, namun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa faktor politik yang ada di sekitarnya.

5.2 *Implikasi*

- 1) Mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dalam pengalokasian anggaran pendidikan dan sehingga penggunaan anggaran pendidikan lebih efisien dan efektif.
- 2) Mendorong pemerintah pusat dan auditor lebih ketat dalam melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran pendidikan pada pemerintah daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.

5.3 *Keterbatasan*

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan populasi pemerintah daerah di pulau Jawa, belum menggunakan seluruh populasi di Indonesia.
- 2) Penelitian ini hanya meneliti proporsi alokasi anggaran pendidikan saat penyelenggaraan pilkada saja, namun tidak meneliti proporsi alokasi anggaran pendidikan setelah pilkada.

Daftar Pustaka

- Amaefula, C., Okezie, C. A., dan Mejeha, R. 2012. *Risk Attitude and Insurance: A Causal Analysis*. American Journal of Economics, 2 (3): 26-32.
- Arifin, T., M. A. Prabowo, dan I. Trinugroho. 2013. *Local Governance and Corruption: Some Indonesian Evidence*. SEADI Discussion Paper Series 9.
- Bamber, L. S., J. X. Jiang, dan I. Y. W. 2010. *What's My Style? The Influence of Top Managers on Voluntary Corporate Financial Disclosure*. The Accounting Review 85 (4): 1131-1162.
- Bardhan, Pranab dan Tsung-T. Y. 2004. *Political Competition in Economic Perspective*. BREAD Working Paper No. 078.

- Downs, A. "An Economic Theory of Political Action In a Democracy". The Journal of Political Economy, 1957, No. 2: 135-150.
- Eisenhardt, K.M.1989."Agency Theory: An Assessment and Review". Academy of Management Review, Vol. 14 (1): 57-74.
- Fitriyah. 2011. *Kekuasaan, korupsi dan Pemilukada*. Forum Universitas Diponegoro 39 (2): 14-19.
- Fiske, E.B. 1998. *Desentralisasi Pengajaran, politik dan consensus*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Foucault, M. 1990. *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1. New York: Vintage Books.
- Freeman, Robert J. dan Craig D. S. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting—Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hambrick, D. C., dan P. Mason. 1984. *Upper Echelons: The Organization as A Reflection of Its Top Managers*. Academy of Management Review 9 (2): 193-206.
- Harold D. L, A. Kaplan. 1970. *Power and Society*, New Haven: Yale University Press.
- Idris, Z. 1992. *Pengantar Pendidikan I*, Jakarta: Gramedia.
- Jensen, Michael C. dan Clifford W. Smith, Jr. 1984. *The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview*. New York: Mc Graw Hill.
- Peter, J. P. dan Jerry C. O. 2000. *Consumer behavior: Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran* Jilid 1. Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Prasetyo, A. 2014. *Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Raharjo, Dawam. 2012. *Dimana Ruh Politik Anggaran*. [pengar. buku] Aaron Wildavsky dan Naomi Caiden. [penerj.] Suraji dan Sufiansyah. Dinamika Politik Anggaran. Yogyakarta: Matepena Consultindo.
- Ritonga, I.T. dan Alam, M.I. 2010. *Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII, Purwokerto.
- Tanzi, V. 1998. *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*, IMF Working Paper, WP/98/63, May 1998.
- Hagen, V. J. 2002. *Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance*. The Economic and Social review. 33(3): 263-284.
- Yusup, M. 2015. *Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah dan Afiliasi Partai Politik terhadap Indikasi Terjadinya Korupsi Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Apendiks

Lampiran I : Data Sampel Penelitian

No	Nama Pemda	Proporsi Anggaran Pendidikan		
		T-2	T-1	T
1	PROVINSI DKI JAKARTA	26,206	29,112	29,92
2	KOTA DEPOK	25,920	30,635	29,63
3	KAB. SUKABUMI	14,055	34,723	41,71
4	KAB. BANDUNG	44,721	40,854	46,05
5	KAB. KARAWANG	34,015	32,660	31,82
6	KAB. TASIKMALAYA	46,568	47,425	56,13
7	KAB. CIANJUR	49,466	52,692	47,67
8	KOTA CIMAHI	35,365	38,673	37,37
9	KOTA TASIKMALAYA	40,488	42,232	39,02
10	KOTA SUKABUMI	8,165	31,921	33,11
11	KOTA BANDUNG	32,998	34,498	32,83

12	KOTA BANJAR	29,083	30,484	33,80
13	KOTA BOGOR	35,631	33,797	33,52
14	KAB. PURWAKARTA	43,112	39,123	36,16
15	KAB. MAJALENGKA	54,790	52,519	48,41
16	KAB. SUBANG	43,416	41,376	38,60
17	KAB. BOGOR	40,436	33,680	39,12
18	KAB. GARUT	56,422	53,131	52,21
19	KAB. CIAMIS	61,152	57,775	49,15
20	KOTA SEMARANG	39,315	29,601	33,28
21	KOTA SURAKARTA	38,944	42,988	46,23
22	KOTA PEKALONGAN	0,599	33,221	32,18
23	KOTA MAGELANG	36,461	36,770	35,11
24	KAB. REMBANG	45,302	42,954	41,77
25	KAB. PURBALINGGA	48,691	47,304	47,26
26	KAB. BOYOLALI	47,709	46,690	46,41
27	KAB. BLORA	47,740	46,321	48,70
28	KAB. KENDAL	46,971	44,657	44,93
29	KAB. SUKOHARJO	48,254	46,986	48,17
30	KAB. SEMARANG	39,195	36,130	42,53
31	KAB. WONOSOBO	45,648	40,960	42,81
32	KAB. PURWOREJO	48,962	47,564	46,38
33	KAB. KLATEN	57,332	56,130	53,82
34	KAB. PEMALANG	52,485	47,921	48,26
35	KAB. SRAGEN	54,560	48,851	49,55
36	KOTA SALATIGA	28,878	29,441	37,17
37	KAB. JEPARA	39,406	45,299	47,02
38	KAB. PATI	44,190	46,931	49,37
39	KAB. CILACAP	41,033	45,431	43,39
40	KAB. BREBES	44,387	52,563	49,57
41	KOTA TEGAL	31,571	37,493	36,37
42	KAB. BANYUMAS	54,952	50,905	51,60
43	KAB. TEMANGGUNG	46,078	49,263	41,03
44	KAB. KUDUS	40,199	40,041	43,15
45	KAB. KARANGANYAR	45,807	41,444	55,18
46	KAB. MAGELANG	45,397	48,116	57,11
47	KAB. GUNUNG KIDUL	45,106	43,673	49,66
48	KAB. SLEMAN	45,001	43,306	36,36
49	KOTA YOGYAKARTA	34,739	36,467	35,10
50	KAB. KULON PROGO	52,398	45,500	54,60
51	KOTA BLITAR	38,471	38,362	36,85
52	KOTA PASURUAN	24,877	23,069	26,36
53	KAB. NGAWI	49,266	49,417	46,27
54	KAB. PONOROGO	49,526	49,484	46,64
55	KAB. KEDIRI	46,052	42,883	42,17
56	KAB. SITUBONDO	43,001	44,359	39,74
57	KAB. GRESIK	31,364	27,751	27,43
58	KAB. TRENGGALEK	45,246	41,006	47,60
59	KAB. MOJOKERTO	36,896	41,458	37,99
60	KAB. BANYUWANGI	42,954	41,445	45,22
61	KAB. MALANG	33,033	42,335	38,53
62	KAB. SIDOARJO	33,075	32,897	35,79
63	KAB. BLITAR	53,359	52,230	48,16
64	KAB. TUBAN	44,475	42,211	43,17
65	KOTA BATU	24,943	29,757	30,97
66	KOTA MOJOKERTO	22,646	25,012	27,94
67	KOTA KEDIRI	35,841	34,387	34,64
68	KOTA MADIUN	43,702	32,186	40,14
69	KAB. PROBOLINGGO	31,609	36,564	43,10
70	KAB. SAMPANG	27,402	35,533	44,84
71	KAB. BOJONEGORO	36,382	39,381	43,82
72	KAB. NGANJUK	45,398	43,260	45,48
73	KAB. PAMEKASAN	42,215	42,554	48,21
74	KAB. PASURUAN	33,641	37,842	44,35
75	KAB. MAGETAN	41,190	42,719	51,00

76	KAB. MADIUN	40,817	38,972	47,46
77	KAB. LUMAJANG	40,406	36,719	45,67
78	KAB. BONDOWOSO	35,860	34,948	43,80
79	KAB. JOMBANG	39,192	36,111	41,18
80	KOTA CILEGON	26,408	27,480	27,05
81	KOTA TANGERANG SELATAN	24,544	23,417	25,83
82	KAB. SERANG	31,002	32,497	37,65
83	KOTA SERANG	37,525	35,572	39,44
84	KOTA TANGERANG	39,449	35,263	38,40
85	KAB. LEBAK	53,307	48,657	45,57

No	Nama Pemda	Variabel			
		Tingkat Pendidikan	Umur Kepala Daerah	Dukungan Partai Politik	Kompetisi Partai
1	PROVINSI DKI JAKARTA	4	3	3	0,44
2	KOTA DEPOK	2	2	2	0,3
3	KAB. SUKABUMI	3	2	4	0,3
4	KAB. BANDUNG	3	2	3	0
5	KAB. KARAWANG	2	1	3	0,28
6	KAB. TASIKMALAYA	4	3	3	1
7	KAB. CIANJUR	3	3	3	0,46
8	KOTA CIMAHI	2	3	3	0,24
9	KOTA TASIKMALAYA	3	2	3	0,62
10	KOTA SUKABUMI	4	2	3	0,23
11	KOTA BANDUNG	3	3	3	0,16
12	KOTA BANJAR	2	2	2	0,12
13	KOTA BOGOR	3	2	3	0,29
14	KAB. PURWAKARTA	2	2	3	0,58
15	KAB. MAJALENGKA	3	3	3	0,26
16	KAB. SUBANG	3	1	3	0,4
17	KAB. BOGOR	3	2	3	0,84
18	KAB. GARUT	4	3	4	0,2
19	KAB. CIAMIS	4	3	3	0,48
20	KOTA SEMARANG	3	2	3	0,44
21	KOTA SURAKARTA	1	2	4	0,53
22	KOTA PEKALONGAN	2	2	4	0,23
23	KOTA MAGELANG	2	3	3	0,4
24	KAB. REMBANG	2	2	1	0
25	KAB. PURBALINGGA	3	2	3	0,6
26	KAB. BOYOLALI	2	2	3	0,78
27	KAB. BLORA	2	2	4	0,2
28	KAB. KENDAL	4	2	4	0,36
29	KAB. SUKOHARJO	3	2	4	0,49
30	KAB. SEMARANG	3	3	3	0,42
31	KAB. WONOSOBO	3	2	4	0,29
32	KAB. PURWOREJO	1	3	3	0,2
33	KAB. KLATEN	4	3	4	0,36
34	KAB. PEMALANG	3	2	3	0,52
35	KAB. SRAGEN	3	2	4	0,2
36	KOTA SALATIGA	2	2	3	0,4
37	KAB. JEPARA	2	2	3	0,24
38	KAB. PATI	3	2	4	0,16

39	KAB. CILACAP	1	2	4	0,36
40	KAB. BREBES	3	2	3	0,46
41	KOTA TEGAL	2	2	2	0,23
42	KAB. BANYUMAS	3	3	3	1
43	KAB. TEMANGGUNG	3	2	3	0,47
44	KAB. KUDUS	2	2	3	0,42
45	KAB. KARANGANYAR	3	3	3	1
46	KAB. MAGELANG	4	3	2	1
47	KAB. GUNUNG KIDUL	2	3	4	0,36
48	KAB. SLEMAN	3	2	3	0,42
49	KOTA YOGYAKARTA	2	2	3	0,39
50	KAB. KULON PROGO	4	3	3	0,4
51	KOTA BLITAR	3	3	3	0,72
52	KOTA PASURUAN	1	1	3	0,1
53	KAB. NGAWI	2	2	3	0,96
54	KAB. PONOROGO	2	3	4	0,27
55	KAB. KEDIRI	2	3	3	0,62
56	KAB. SITUBONDO	2	2	4	0,29
57	KAB. GRESIK	4	3	3	0,28
58	KAB. TRENGGALEK	3	2	3	0,13
59	KAB. MOJOKERTO	2	2	3	0,34
60	KAB. BANYUWANGI	3	2	3	0,78
61	KAB. MALANG	3	2	3	0,72
62	KAB. SIDOARJO	3	3	4	0,26
63	KAB. BLITAR	3	3	4	0,26
64	KAB. TUBAN	1	3	3	1
65	KOTA BATU	1	2	3	0,48
66	KOTA MOJOKERTO	2	3	3	0,28
67	KOTA KEDIRI	2	1	3	0,2
68	KOTA MADIUN	3	3	4	0,47
69	KAB. PROBOLINGGO	2	1	4	0,18
70	KAB. SAMPANG	3	2	4	0,36
71	KAB. BOJONEGORO	3	2	3	0,28
72	KAB. NGANJUK	2	3	2	0,18
73	KAB. PAMEKASAN	3	2	3	0,38
74	KAB. PASURUAN	4	3	3	0,16
75	KAB. MAGETAN	3	3	3	0,27
76	KAB. MADIUN	2	3	4	0,33
77	KAB. LUMAJANG	3	2	4	0,32
78	KAB. BONDOWOSO	2	2	3	0,53
79	KAB. JOMBANG	3	2	2	0,24
80	KOTA CILEGON	2	2	3	0,15
81	KOTA TANGERANG SELATAN	1	1	3	0,1
82	KAB. SERANG	3	2	3	0,8
83	KOTA SERANG	2	2	3	0,56
84	KOTA TANGERANG	3	1	3	0,42
85	KAB. LEBAK	3	2	4	0,18

Lampiran II : Hasil Olah Data Statistik

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AP	85	25,83	57,11	41,8678	7,43078
TP	85	1,00	4,00	2,6235	,81615
U	85	1,00	3,00	2,2706	,60530
DP	85	1,00	4,00	3,1765	,60112
KP	85	,00	1,00	,4015	,24082
Valid N (listwise)	85				

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 AP	41,8678	85	7,43078	,80598
AP_1	40,3055	85	7,71828	,83717
Pair 2 AP	41,8678	85	7,43078	,80598
AP_2	39,8164	85	10,55494	1,14484
Pair 3 AP_1	40,3055	85	7,71828	,83717
AP_2	39,8164	85	10,55494	1,14484

2. Uji Beda Paired Sample T-Test

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		AP_2	AP_1	AP
N		85	85	85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	39,8164	40,3055	41,8678
	Std. Deviation	10,55494	7,71828	7,43078
Most Extreme Differences	Absolute	,091	,058	,079
	Positive	,061	,053	,053
	Negative	-,091	-,058	-,079
Kolmogorov-Smirnov Z		,835	,532	,728
Asymp. Sig. (2-tailed)		,488	,939	,664

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Uji Beda Paired Sample t Test

		Paired Samples Test							
		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	AP - AP_1	1,56225	4,47383	,48525	,59727	2,52723	3,219	84	,002
Pair 2	AP - AP_2	2,05138	7,27507	,78909	,48218	3,62057	2,600	84	,011
Pair 3	AP_1 - AP_2	,48913	6,19374	,67180	-,84683	1,82509	,728	84	,469

3. Regresi Linear Berganda

a. Asumsi Klasik

Normalitas = sig > 0,05

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,29198299
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,061
	Negative	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		,927
Asymp. Sig. (2-tailed)		,356

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Multikolinearitas = VIF < 10, Tolerance > 0,10

Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	18,156	4,823		3,765	,000		
TP	2,065	,909	,227	2,271	,026	,898	1,113
U	2,814	1,241	,229	2,267	,026	,877	1,140
DP	2,803	1,179	,227	2,376	,020	,984	1,016
KP	7,477	3,012	,242	2,482	,015	,940	1,063

a. Dependent Variable: AP

Autokorelasi = $du < dw < 4-du$

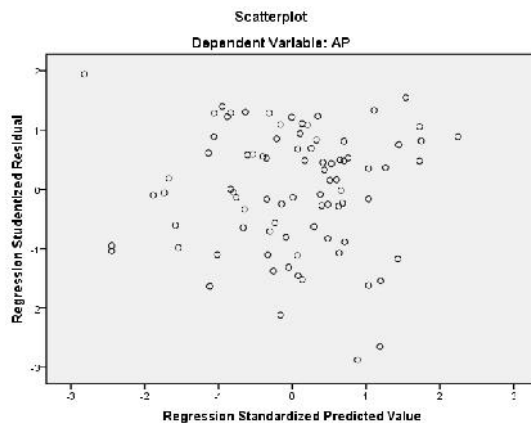
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,532 ^a	,283	,247	6,44736	1,563

a. Predictors: (Constant), KP, DP, TP, U

b. Dependent Variable: AP

Heterokesdastisitas = data menyebar



b. Regresi Linear Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,532 ^a	,283	,247	6,44736	1,563

a. Predictors: (Constant), KP, DP, TP, U

b. Dependent Variable: AP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1312,708	4	328,177	7,895	,000 ^a
	Residual	3325,480	80	41,569		
	Total	4638,188	84			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18,156	4,823		3,765	,000		
	TP	2,065	,909	,227	2,271	,026	,898	1,113
	U	2,814	1,241	,229	2,267	,026	,877	1,140
	DP	2,803	1,179	,227	2,376	,020	,984	1,016
	KP	7,477	3,012	,242	2,482	,015	,940	1,063

a. Dependent Variable: AP